

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kinerja keuangan merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas public oleh organisasi sektor public seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemendan lembaga Negara. Fenomena kegagalan pengukuran kinerja seringkali disebabkan oleh tidak adanya system pengukuran kinerja formal yang menginformasikan tingkat keberhasilan instansi dan keterbatasann sumber daya manusia SDM).<sup>2</sup>

Gresik mempunyai upah minimum regional (UMR) yang tertinggi nomor dua se Jawa timur yaitu sebesar Rp. 4.874.133,00.<sup>3</sup>

**Tabel 1.1**  
**Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) di Jawa Timur**  
**Tahun 2025**

No.	Kabupaten atau Kota	UMK
1	Kota Surabaya	Rp. 4.961.753,00
2	Kabupaten Gresik	Rp. 4.874,133,00
3	Kabupaten Sidoarjo	Rp. 4.870.511,00
4	Kabupaten Pasuruan	Rp. 4.866.890,00
5	Kabupaten Mojokerto	Rp. 4.856.026,00
6	Kabupaten Malang	Rp. 3.553.530,00

---

<sup>2</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Keempat* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), Hal. 1

<sup>3</sup> BAPPEDA JATIM, *UMK Jawa Timur 2025 telah ditetapkan Surabaya Tertinggi*, <https://bappeda.jatimprov.go.id/2025/01/01/umk-jawa-timur-2025-telah-ditetapkan-surabaya-tertinggi/>. Diakses pada 30 April 2025

7	Kota Malang	Rp. 3.507.693,00
8	Kota Batu	Rp. 3.360.466,00
9	Kota Pasuruan	Rp. 3.358.557,00
10	Kabupaten Jombang	Rp. 3.137.004,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) JATIM Tahun 2025

Namun laporan keuangan pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu Rp. 1,171,022,355,999,09 pada Tahun 2023 dengan rasio desentralisasi 34,38% namun di tahun 2022 yaitu Rp. 1,191,779,202,154,29 dengan rasio desentralisasi 35,40% Pada periode 2019-2023, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menghadapi beberapa tantangan signifikan. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), realisasi pendapatan sering kali tidak memenuhi target yang ditetapkan, mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, belanja daerah sering kali tidak terkelola secara efisien, dengan alokasi anggaran yang tidak selalu sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, serta rendahnya serapan anggaran di beberapa sektor penting. Kinerja keuangan ini juga dipengaruhi oleh penurunan kegiatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang berdampak pada penurunan pendapatan dan meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penanggulangan dampak pandemi. Akibatnya, Kabupaten Gresik menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan anggaran, memitigasi defisit, dan memastikan penggunaan dana yang efektif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hingga saat ini masih ada sebagian masyarakat yang memiliki anggapan bahwa laporan keuangan hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki pengetahuan akuntansi atau keuangan saja. Sementara itu, masyarakat pembaca laporan keuangan yang berlatar belakang akuntansi tidak merasa bahwa laporan keuangan tersebut juga diperuntukkan bagi mereka.<sup>4</sup> Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah secara umum menerangkan mekanisme atas diberikannya hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system NKRI, termasuk urusan pada bidang administrasi, politik dan ekonomi serta pengelolaan keuangan daerah. Pemberian otonomi daerah ditunjukkan untuk memicu kemandirian daerah dalam mengembangkan dan menggali sumber daya yang dimilikinya. Peningkatan pelayanan public dan perekonomian daerah merupakan tujuan utama pemberian wewenang kepada daerah otonom. Pengelolaan keuangan daerah seperti yang tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didasarkan atas asa desentralisasi yang menjadi landasan bagi pemerintah pusat untuk menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah.<sup>5</sup> struktur APBD adalah belanja daerah. Belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Komponen terakhir dari APBD yaitu pembiayaan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*,,hal.1

<sup>5</sup> Rizki Sari, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020*, Vol. 5, No. 3, Jurnal Ilmiah MEA, 2021, Hal. 2296

Pembiayaan adalah komponen anggaran yang disediakan untuk menampung transaksi keuangan guna memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran serta penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan APBD diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja. Analisis rasio merupakan salah satu cara dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan daerah. Analisis rasio keuangan APBD dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode anggaran dengan periode anggaran sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan atau tren yang terjadi dengan memahami dan menginterpretasikan hasil perhitungan merupakan tanah dataran rendah.<sup>6</sup>

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat dari pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Pengertian dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menciptakan system keuangan yang mandiri tidak bergantung pada pemerintah pusat, akuntabel dapat dipertanggung

---

<sup>6</sup> Novita Ekowati, *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggaleki*, Jurnal Manajemen Keuangan FEB Universitas Brawijaya, hal.2

jawabkan di mata hukum yang berlaku, dan transparan terbuka bagi seluruh masyarakat bagi daerah. Secara lebih lanjut kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini tata kelola keuangan daerah diatur dalam pasal 3 ayat 3 peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang di dalamnya dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan kaidah yang berlaku serta dituangkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).<sup>7</sup>

Salah satu asas dalam hubungan antara keuangan pusat dan keuangan daerah adalah asas desentralisasi fiskal. Disamping asas desentralisasi fiskal, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga ditunjukkan dengan asas desentralisasi. Dimana desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk bisa lebih mandiri khususnya dalam masalah pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, dana penimbangan tetap diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dengan bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan kebijakan penggunaan ke tiga dan tersebut tetap diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan penggunaan dana

---

<sup>7</sup> *Ibid...*, hal.2

transfer dari pemerintah pusat dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penggunaan rasio pada sektor publik khususnya anggaran pendapatan dan belanja daerah belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.<sup>9</sup>

**Tabel 1. 2**  
**Data Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Belanja Daerah</b>
2019	980.776.381.995.43	2.339.289.318.844.41
2020	924.657.913.563.07	2.485.716.405.435.02
2021	1.031.387.734.236.41	3.192.751.693.289.33
2022	1.191.799.202.154.29	3.554.078.352.827.67
2023	1.171.022.355.999.09	3.418.637.234.689.96

Sumber: Dokumen BPKAD Kabupaten Gresik 2024 (Data diolah)

Berdasarkan Data Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik mengalami perkembangan yang kurang maksimal dilihat pada besaran antara pendapatan daerah dan belanja daerah pendapatan daerah selalu lebih kecil dibandingkan belanja daerah. Jika pendapatan daerah yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan

---

<sup>8</sup> Tiara Adelia, Analisis Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupateb Jember Tahun Anggaran 2018-2021

<sup>9</sup> Dwijayanti dkk, "Analisi perbandingan Kinerja Kkeuangan Pemerintah Propinsi SeIndonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 12. Nomor 01, 2013

jumlah belanja yang dikeluarkan, maka kinerja keuangan dapat dikatakan telah berjalan dengan maksimal. Sebaliknya, jika jumlah pendapatan daerah yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan jumlah belanja yang dikeluarkan maka kinerja keuangan dikatakan kurang maksimal dan secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap perkembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan yang baik tidak cukup hanya dibutuhkan SDM yang kompeten melainkan daerah harus memiliki kemampuan yang memadai sehingga dari dua hal tersebut saling berkaitan yang mana akan menghasilkan sasaran, tujuan, visi dan misi sehingga masyarakat tidak terlalu terbebani dalam iuran pajak dan restribusi daerah. Dengan demikian maka, suatu daerah yang kinerja keuangannya baik dapat dikategorikan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan dan kemandirian di sektor finansial untuk membiayai sendiri pelaksanaan otonomi daerahnya.

Kinerja keuangan adalah suatu keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang baik. Menurut Rizky Dwi Setianingrum dan Haryanto, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil perolehan dari kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan berkaitan dalam penggunaan anggaran daerah dengan menilai efisensi pada pelayanan kepada masyarakat sebagai alat ukur kemampuan daerah.<sup>10</sup> Peneliti tersebut

---

<sup>10</sup> Rizqi Dwi Setianingrum, Haryanto, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah*, Journal Of Accounting, Volume. 9, No. 2, 2020, hal 13.

menggunakan perhitungan tujuh rasio yaitu rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio kemandirian, rasio pendapatan pad, pertumbuhan pad, rasio likuiditas.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Wibawa dkk Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.<sup>11</sup> Penelitian tersebut hanya menggunakan satu rasio yaitu rasio efektifitas.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu peneliti memfokuskan pada analisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun anggaran 2019-2023. Sebagaimana untuk menganalisis pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan melakukan analisis rasio terhadap laporan keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah, akan diketahui apakah kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat atau menurun setiap tahunnya. Selain itu dengan menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah berharap agar kinerja keuangan di masa yang akan datang menjadi lebih baik sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>11</sup> I Gede Agus Wibawa, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan*, *Jurnal Administrasi Public*, Volume. 8, No.1, 2023.

Penelitian kali ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Periode yang digunakan cukup luas dan terbaru dari tahun 2019-2023. Pada peneliti ini memperluas perhitungan dengan menggunakan enam rasio, berbeda dengan peneliti terdahulu yang hanya menggunakan tiga sampai lima rasio. Diharapkan dapat menambah dan memperluas informasi mengenai analisis laporan kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjang penelitian sebelumnya sebagai penegas bahwa masing-masing daerah dalam waktu yang berbeda memiliki hasil yang berbeda, sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengukur dan evaluasi kinerja keuangan daerah kabupaten lain umumnya dan khususnya tata kelola keuangan pemerintah kabupaten Gresik. Lebih mendalam lagi peneliti mengharapkan dengan judul tersebut menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Peneliti menggunakan wilayah ini dikarenakan memiliki potensi yang baik sehingga tertarik untuk mengukur seberapa tingkat kemampuan kinerja keuangan daerah di wilayah tersebut. Dengan demikian penulis mengangkat judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam menganalisis suatu laporan keuangan daerah dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan keuangan daerah yang tentunya dihadapi pemerintah daerah yang berkaitan, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah, permasalahan tersebut adalah masih

bergantungnya pemerintah daerah terhadap subsidi pemerintah pusat yang dapat dilihat dari besarnya transfer pemerintah pusat dari anggaran pemerintah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik jika dilihat menggunakan Rasio Efektivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik jika dilihat menggunakan Rasio Efisiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik jika dilihat menggunakan Rasio Kemandirian?
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik jika dilihat menggunakan Rasio Keserasian?
5. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik jika dilihat menggunakan Rasio Pertumbuhan PAD?
6. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik jika dilihat menggunakan Rasio Desentralisasi Fiskal?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023 melalui Rasio Efektivitas PAD.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023 melalui Rasio Efisiensi Belanja.

3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023 melalui Rasio Kemandirian.
4. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023 melalui Rasio Keserasian.
5. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023 melalui Rasio Pertumbuhan.
6. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023 melalui Rasio Desentralisasi.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori manajemen keuangan publik dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

##### 2. Kegunaan Praktisi

###### a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam hal kinerja keuangan daerah.

###### b. Bagi Akademik

Untuk menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

**F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian merupakan suatu batasan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian, agar lebih efektif serta efisien dan penelitian sehingga peneliti dapat memisahkan aspek tertentu dengan objek yang diteliti. Sedangkan batasan masalah adanya upaya untuk menetapkan ruang lingkup penelitian. Batasan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang termasuk ruang lingkup masalah serta apa saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi tersebut peneliti memberi batasan masalah yang diteliti agar lebih spesifik yaitu terhadap kinerja keuangan.

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian diatas, maka penelitian ini menggunakan data langsung dari APBD Kabupaten Gresik. Penelitian ini hanya dibatasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023

## **G. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan refleksi atas tingkat pencapaian yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan milik suatu daerah sesuai dengan visi, misi, serta tujuan yang telah ditetapkan

#### b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah data keuangan yang disajikan secara terstruktur yang menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah

#### c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Belanja Modal

#### d. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi.

Dalam pengukuran kinerja keuangan ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu:

a) Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan

b) Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

c) Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

d) Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan Mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya

e) Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada

f) Rasio Desentralisasi

Rasio Desentralisasi Fiskal adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan.

## **H. Definisi Operasional**

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gresik mencakup pengukuran dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kinerja ini diukur menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio efisiensi, efektivitas, keserasian, kemandirian, pertumbuhan dan desentralisasi fiskal. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai seberapa baik pemerintah dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.

## **I. Sistematika Penulisan**

**BAB I**      Pendahuluan, pada bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup serta keterbatasan penelitian, dan juga penegasan istilah yang meliputi definisi

konseptual dan definisi operasional. Pada bab ini menjelaskan tentang garis besar dan pembahasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

**BAB II** Kajian Pustaka, pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan deskripsi variabel, peneliti terdahulu, dan kerangka konseptual.

**BAB III** Metode Penelitian, pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitian, sumber data skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV** Hasil Penelitian, pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan interpretasi hasil penelitian.

**BAB V** Pembahasan, pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan pembahasan data penelitian dan hasil data.

**BAB VI** Penutup, pada bab ini peneliti menguraikan yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.